

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi yang mencerminkan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia dalam kegiatan produksi. Dalam perspektif ekonomi makro, pengangguran tidak hanya berkaitan dengan individu yang belum bekerja, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Kondisi ini mengindikasikan adanya sumber daya yang tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga mengurangi potensi output ekonomi suatu wilayah (Agustina et al., 2023). Selain itu, pengangguran juga berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya tekanan sosial ekonomi di tingkat regional (Rahmah et al., 2025). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas tenaga kerja akibat berkurangnya pengalaman kerja dan keterampilan yang dimiliki (Permana et al., 2025).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja suatu wilayah. TPT menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan namun aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu (BPS, 2024). Semakin tinggi nilai TPT, maka semakin besar ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja yang terjadi. Oleh karena itu, indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan daerah (Nurhaila & Anwar, 2024). Selain itu, TPT juga

mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan kesempatan kerja yang memadai bagi penduduknya (Qushoy et al., 2022).

Dalam teori ekonomi makro, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dijelaskan melalui Hukum Okun yang menyatakan bahwa peningkatan output ekonomi akan diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Teori ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, dalam praktik empiris, hubungan tersebut tidak selalu berjalan secara proporsional di berbagai wilayah (Ponto, 2023). Banyak daerah mengalami kondisi di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi dan karakteristik sektor produksi turut memengaruhi dinamika pengangguran (Djunaidi & Alfitri, 2022).

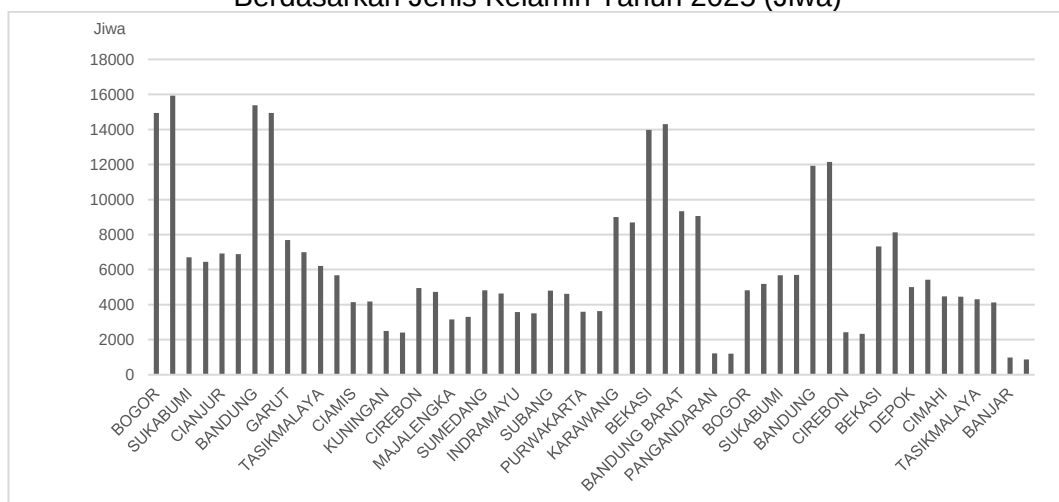
Fenomena *jobless growth* menjadi salah satu bukti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai. Kondisi ini umumnya terjadi pada wilayah yang mengalami transformasi struktural menuju sektor industri berbasis teknologi dan padat modal (Faishal, 2024). Dalam kondisi tersebut, peningkatan produktivitas lebih banyak didorong oleh penggunaan teknologi dibandingkan tenaga kerja manusia. Akibatnya, meskipun output ekonomi meningkat, permintaan terhadap tenaga kerja tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga mempercepat perubahan struktur tenaga kerja dalam perekonomian modern (Hafid et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, permasalahan pengangguran masih menjadi isu yang kompleks. Jawa Barat masih termasuk dalam provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa permasalahan penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan utama di wilayah tersebut (Detik Jabar, 2025). Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi permasalahan utama dalam ekonomi regional yang memerlukan penguatan sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata (Pratama & Taufiqqurrachman, 2025). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik tersebut karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tingginya jumlah penduduk tersebut menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang harus diserap oleh pasar tenaga kerja (Ramadani & Iskandar, 2024). Selain itu, Jawa Barat juga memiliki basis industri manufaktur yang kuat sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional (Noviyanti, 2021). Namun demikian, tingginya aktivitas ekonomi tersebut tidak secara otomatis menjamin rendahnya tingkat pengangguran di seluruh wilayah.

Selain tingginya jumlah penduduk, dinamika pasar tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat juga dipengaruhi oleh arus migrasi penduduk yang relatif besar. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan kawasan industri manufaktur yang terkonsentrasi di wilayah Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan sekitarnya, Jawa Barat menjadi daerah tujuan utama migrasi bagi penduduk yang mencari peluang kerja dan peningkatan kesejahteraan. Teori migrasi ekonomi menjelaskan bahwa perpindahan penduduk umumnya dipengaruhi oleh perbedaan kesempatan kerja, tingkat upah, serta prospek ekonomi antarwilayah (Smith, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan jumlah penduduk usia produktif dan angkatan kerja di daerah tujuan migrasi sehingga memperbesar

tekanan terhadap pasar tenaga kerja apabila penciptaan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan tenaga kerja. Fenomena ini juga didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa migrasi memiliki hubungan erat dengan dinamika pengangguran, khususnya pada wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan industri, karena peningkatan arus migrasi dapat memperbesar persaingan memperoleh pekerjaan serta meningkatkan risiko pengangguran apabila penyerapan tenaga kerja berlangsung lebih lambat daripada pertumbuhan jumlah pencari kerja (Batubara, 2021; Ramadani & Iskandar, 2024)

Gambar 1.1 Migrasi Masuk Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 (Jiwa)



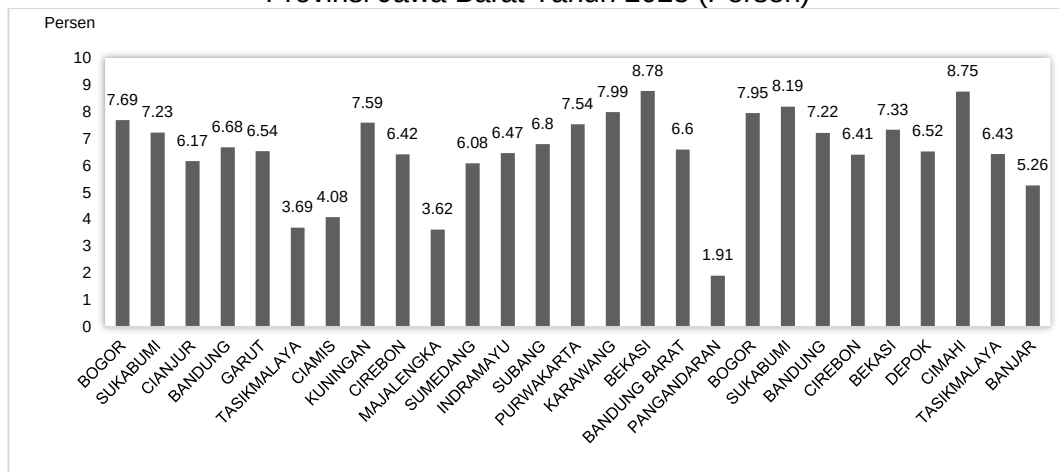
Sumber: Open Data Provinsi Jawa Barat (2026), Diolah (2026)

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melalui Open Data Jabar, arus migrasi masuk antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih menunjukkan jumlah yang tinggi hingga tahun 2025 dan tersebar pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mobilitas penduduk di dalam wilayah Jawa Barat masih berlangsung secara intensif sebagai respons terhadap perbedaan kesempatan kerja, perkembangan kawasan industri, serta aktivitas ekonomi antarwilayah.

Tingginya mobilitas penduduk ini memperkuat argumentasi bahwa permasalahan pengangguran di Jawa Barat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengupahan, dan partisipasi angkatan kerja, tetapi juga oleh dinamika perpindahan penduduk yang meningkatkan jumlah pencari kerja di daerah tujuan migrasi.

Provinsi Jawa Barat memiliki dinamika pengangguran yang cukup kompleks jika dilihat dari perkembangan antar waktu. Hal ini dapat dilihat pada Provinsi Jawa Barat memiliki dinamika pengangguran yang cukup kompleks, yang dapat dilihat dari kondisi terkini antar wilayah kabupaten/kota. Hal ini tercermin pada Gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 memiliki variasi yang cukup signifikan. Beberapa wilayah menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif tinggi, terutama pada daerah dengan konsentrasi industri seperti Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Sukabumi. Sebaliknya, terdapat pula daerah dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah seperti Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Ciamis. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran di Jawa Barat tidak bersifat merata, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi dan struktur wilayah masing-masing daerah.

Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Persen)



Sumber: Open Data Provinsi Jawa Barat (2026), Diolah (2026)

Meskipun data yang digunakan merupakan kondisi terbaru, dinamika pengangguran di Jawa Barat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kondisi ekonomi pada periode sebelumnya. Pada periode sebelum pandemi COVID-19, kondisi pasar tenaga kerja relatif stabil seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di sektor industri. Namun, ketika pandemi melanda pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan pada tingkat pengangguran akibat pembatasan mobilitas dan penurunan produksi (Rahmah et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja sebagai bentuk penyesuaian terhadap tekanan ekonomi. Akibatnya, tingkat pengangguran terbuka mengalami lonjakan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Permana et al., 2025).

Pasca pandemi, kondisi pasar tenaga kerja di Jawa Barat mulai mengalami pemulihan secara bertahap. Meskipun demikian, pemulihan tersebut tidak berlangsung secara merata di seluruh wilayah kabupaten/kota. Hal ini tercermin dari masih adanya perbedaan tingkat pengangguran pada tahun 2025, di mana beberapa daerah industri masih menghadapi tingkat pengangguran yang relatif

tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan struktur produksi yang semakin mengarah pada penggunaan teknologi. Fenomena ini dikenal sebagai *jobless recovery*, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja (Ponto, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan pengangguran secara struktural. Temuan tersebut juga sejalan dengan laporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, penurunan tingkat pengangguran belum sepenuhnya optimal sehingga masih diperlukan upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja secara lebih luas (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2024).

Selain itu, variasi tingkat pengangguran antar wilayah yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 memperlihatkan adanya ketimpangan kondisi ekonomi antar kabupaten/kota. Beberapa daerah memiliki tingkat pengangguran yang tinggi akibat dominasi sektor industri padat modal, sementara daerah lain yang berbasis pertanian atau pariwisata cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam struktur ekonomi dan kapasitas penyerapan tenaga kerja antar wilayah. Hal ini memperkuat bahwa dinamika pengangguran sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing daerah.

Perbedaan karakteristik sumber daya, kondisi sosial ekonomi, dan struktur wilayah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah yang berdampak pada perbedaan kinerja ekonomi masing-masing wilayah (Taufiqqurrachman, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika pengangguran tidak dapat dilepaskan dari karakteristik masing-masing daerah.

Hal ini disebabkan oleh karakteristik industri yang lebih banyak menggunakan teknologi dibandingkan tenaga kerja manusia (Djunaidi & Alfitri, 2022).

Tekanan terhadap pasar tenaga kerja di Jawa Barat juga diperkuat oleh pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan ekonomi daerah. Apabila mampu dikelola dengan baik, peningkatan jumlah penduduk usia kerja dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja, kondisi ini justru dapat meningkatkan pengangguran (Ramadani & Iskandar, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa faktor demografis memiliki peran penting dalam dinamika pasar tenaga kerja.

Selain faktor demografis, dinamika tingkat pengangguran juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam tingkat pendidikan. Dalam konteks pasar tenaga kerja, kualitas tenaga kerja menjadi faktor kunci yang menentukan kemampuan individu untuk memperoleh pekerjaan. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia serta memperluas peluang untuk masuk ke pasar kerja (Alhumami, 2025).

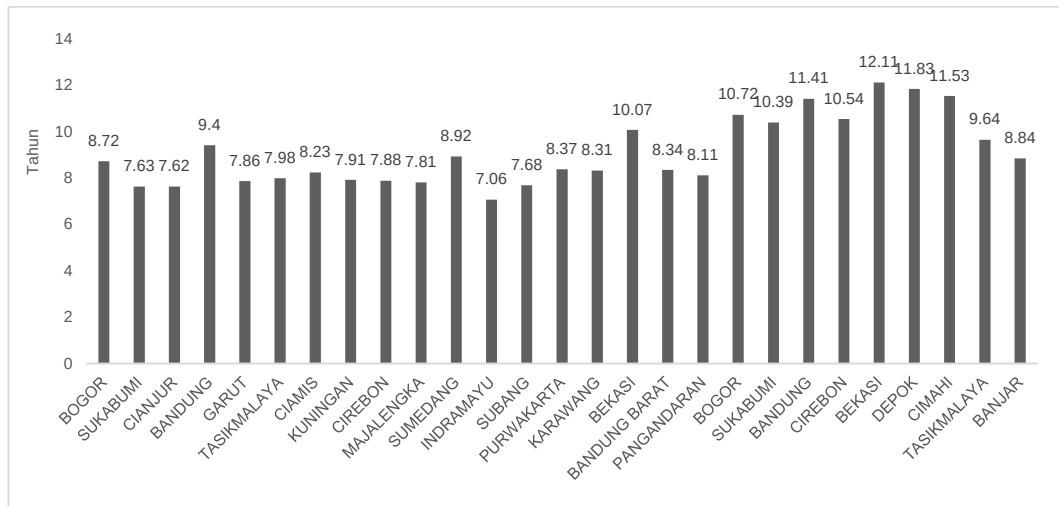
Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam suatu wilayah (Sigalingging

et al., 2024). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan capaian pendidikan masyarakat serta mencerminkan tingkat pemerataan dan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai RLS, maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan penduduk, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Namun demikian, dalam konteks empiris, peningkatan tingkat pendidikan tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (*skill mismatch*). Kondisi ini sering terjadi pada wilayah dengan struktur industri yang berkembang pesat, di mana kebutuhan tenaga kerja lebih spesifik dan berbasis keterampilan tertentu (Faishal, 2024). Akibatnya, meskipun tingkat pendidikan meningkat, tidak semua tenaga kerja dapat terserap secara optimal dalam pasar kerja.

Fenomena tersebut juga terlihat di Provinsi Jawa Barat, di mana tingkat pengangguran masih relatif tinggi meskipun indikator pendidikan menunjukkan tren yang meningkat. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, khususnya pada lulusan pendidikan menengah kejuruan (DPRD Provinsi Jawa Barat, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan perlu diimbangi dengan relevansi kurikulum serta kebutuhan dunia kerja agar dapat memberikan dampak yang optimal terhadap penurunan pengangguran.

Gambar 1.3 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Tahun)



Sumber: Open Data Provinsi Jawa Barat (2026), Diolah (2026)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 memiliki variasi yang cukup signifikan antar wilayah. Nilai RLS tertinggi terdapat pada wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Depok, sedangkan nilai terendah terdapat pada beberapa wilayah kabupaten seperti Indramayu, Cianjur, dan Sukabumi. Variasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan capaian pendidikan formal yang mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia di masing-masing wilayah.

Perbedaan tingkat pendidikan ini mengindikasikan adanya kesenjangan kualitas tenaga kerja antara wilayah perkotaan dan wilayah kabupaten. Daerah perkotaan yang memiliki akses pendidikan lebih baik cenderung menghasilkan tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Namun demikian, tingginya tingkat pendidikan tidak selalu diikuti oleh kemampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja secara optimal (Faishal, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan RLS belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan di seluruh wilayah. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan sektor industri serta terbatasnya lapangan kerja yang tersedia. Dengan demikian, RLS tidak hanya berperan sebagai indikator kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam penyelarasan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Sejalan dengan temuan bahwa salah satu penyebab utama tingginya pengangguran adalah adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja serta tingginya standar kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan (Olii & Dewi, 2023).

Selain itu, kesenjangan RLS antar wilayah juga berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi regional. Wilayah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih baik serta peluang kerja yang lebih luas, sementara wilayah dengan tingkat pendidikan rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini pada akhirnya dapat memengaruhi distribusi tingkat pengangguran antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Sutisna et al., 2025).

Selain faktor pendidikan yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia dari sisi penawaran tenaga kerja (*supply of labor*), dinamika pasar tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor dari sisi permintaan tenaga kerja (*demand of labor*). Dalam hal ini, kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja, khususnya dalam aspek pengupahan. Penetapan upah minimum merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjamin hak pekerja

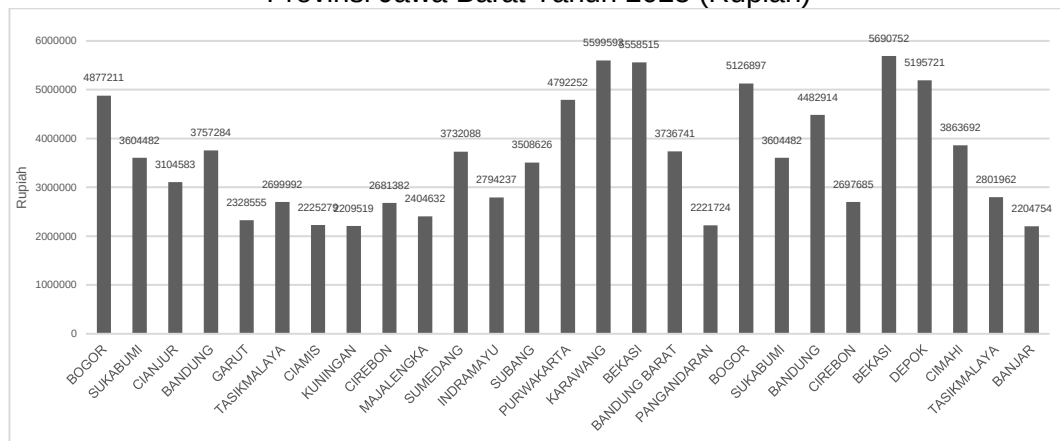
dalam memperoleh penghasilan yang layak serta memberikan perlindungan terhadap potensi ketimpangan upah dalam pasar tenaga kerja. Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan, terutama ketika kondisi ekonomi perusahaan tidak stabil sehingga memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai standar yang telah ditetapkan (Raharjo et al., 2025).

Secara teoritis, penetapan upah minimum bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja serta meningkatkan standar hidup masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kondisi kerja yang lebih layak serta mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Namun demikian, dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, penetapan upah minimum juga dapat menimbulkan konsekuensi terhadap biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan (Juliani & Adha, 2025).

Dalam kondisi tertentu, peningkatan upah minimum dapat mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi, salah satunya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja guna menekan biaya operasional (Salsabila et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga berpotensi memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Namun demikian, dalam perspektif teori upah efisiensi, peningkatan upah juga dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga perusahaan cenderung merespons kenaikan biaya tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas, bukan semata-mata melalui pengurangan tenaga kerja (Agusalim & Novianti, 2024). Dengan demikian, UMK menjadi variabel penting yang perlu dianalisis dalam menjelaskan dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka, khususnya dalam konteks keseimbangan antara

perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan kegiatan produksi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut.

Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Rupiah)



Sumber: Open Data Provinsi Jawa Barat (2026), Diolah (2026)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa UMK di Provinsi Jawa Barat tahun 2025 masih memiliki kesenjangan yang signifikan antar wilayah, dengan nilai tertinggi di Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kota Depok, serta terendah di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh konsentrasi industri, tingkat produktivitas, dan biaya hidup, sehingga wilayah industri cenderung memiliki UMK lebih tinggi. Kesenjangan tersebut mencerminkan variasi perkembangan ekonomi dan struktur industri antar daerah, serta berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan lokasi usaha dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum secara umum justru dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas dan daya beli pekerja (Athallah et al., 2025).

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum juga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Peningkatan upah dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat dalam perekonomian. Kondisi ini dapat meningkatkan produksi dan mendorong perusahaan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja. Namun, dampak tersebut sangat bergantung pada struktur ekonomi dan tingkat produktivitas tenaga kerja di masing-masing wilayah (Athallah et al., 2025). Oleh karena itu, pengaruh UMK terhadap pengangguran tidak dapat digeneralisasi secara sederhana.

Dalam konteks Jawa Barat, perbedaan besaran UMK antar kabupaten/kota cukup signifikan. Wilayah dengan konsentrasi industri tinggi memiliki tingkat UMK yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan ini mencerminkan variasi tingkat produktivitas dan biaya hidup antar wilayah. Selain itu, perbedaan UMK juga mendorong mobilitas tenaga kerja antar daerah karena pekerja cenderung mencari wilayah dengan upah yang lebih tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan persaingan kerja dan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran di wilayah tertentu (Ferdinand et al., 2024).

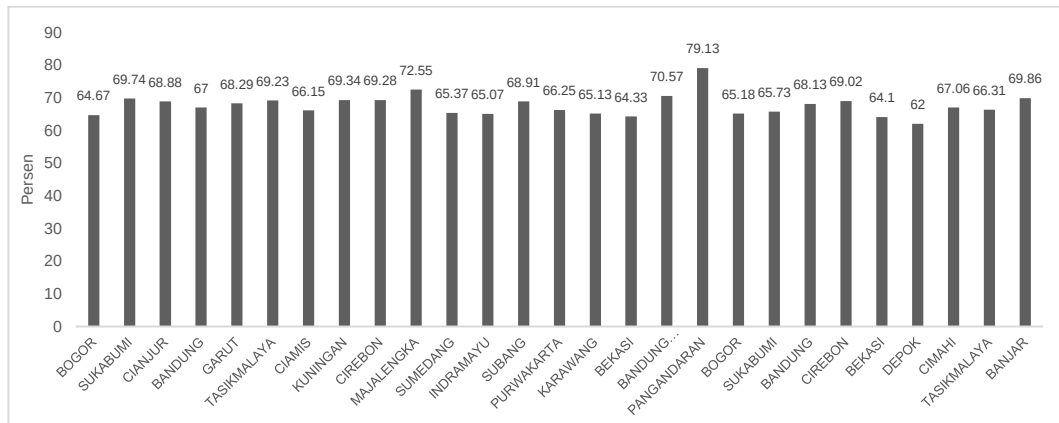
Perbedaan tingkat upah minimum antar wilayah tidak hanya memengaruhi keputusan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja, tetapi juga berkaitan dengan dinamika partisipasi masyarakat dalam pasar kerja. Dalam konteks ini, interaksi antara kebijakan pengupahan dan jumlah angkatan kerja menjadi faktor penting dalam menentukan keseimbangan pasar tenaga kerja. Selain itu, perbedaan upah antar wilayah juga mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi dan berpotensi memengaruhi mobilitas tenaga kerja antar daerah dalam mencari peluang kerja yang lebih baik (Jannah & Septianingtias, 2025).

Selain UMK, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menjadi indikator penting dalam menjelaskan dinamika pengangguran. TPAK mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, yaitu penduduk yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Peningkatan TPAK menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi serta bertambahnya jumlah penawaran tenaga kerja (labor supply), yang dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai (Sholihah & Abdullah, 2024).

Namun demikian, peningkatan TPAK tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah angkatan kerja dan kemampuan sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dapat menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply of labor*). Kondisi ini menyebabkan sebagian angkatan kerja tidak terserap ke dalam pasar kerja, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran terbuka (Sholihah & Abdullah, 2024).

Selain itu, peningkatan TPAK juga dapat dipengaruhi oleh faktor demografis, seperti pertumbuhan penduduk usia produktif, serta faktor ekonomi, seperti dorongan kebutuhan rumah tangga untuk bekerja. Dalam situasi di mana kualitas tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan partisipasi tersebut justru berpotensi memperbesar tekanan pada pasar tenaga kerja. Akibatnya, peningkatan TPAK dapat berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran ((Nurhaila & Anwar, 2024). Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut.

Gambar 1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Persen)



Sumber: Open Data Provinsi Jawa Barat (2026), Diolah (2026)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2025 bervariasi antar wilayah. TPAK tertinggi terdapat di Kabupaten Pangandaran (79,13 persen), sedangkan terendah di Kota Depok (62 persen). Beberapa daerah seperti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor juga memiliki TPAK relatif rendah dibandingkan wilayah lainnya. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi di masing-masing daerah.

Variasi tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antar wilayah. Dalam beberapa kasus, peningkatan TPAK dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi rumah tangga. Kebutuhan ekonomi yang meningkat mendorong lebih banyak anggota keluarga untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah pencari kerja dalam waktu yang relatif singkat. Namun, apabila pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi peningkatan tersebut, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika

pengangguran dipengaruhi oleh interaksi antara faktor ekonomi dan sosial (Amalia et al., 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji determinan pengangguran di Indonesia, sebagian besar masih menggunakan pendekatan agregat pada tingkat nasional atau provinsi. Pendekatan ini cenderung mengabaikan perbedaan karakteristik antarwilayah yang sebenarnya sangat beragam. Padahal, setiap kabupaten/kota memiliki struktur ekonomi, kondisi demografis, serta kebijakan yang berbeda. Hal ini menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang mampu menggambarkan kondisi riil di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang lebih spesifik untuk menangkap variasi tersebut secara lebih akurat (Batubara, 2021).

Selain keterbatasan dalam aspek spasial, penelitian terdahulu juga memiliki keterbatasan dalam dimensi waktu. Banyak penelitian yang menggunakan pendekatan cross-section yang hanya memotret kondisi pada satu periode tertentu. Pendekatan ini tidak mampu menangkap dinamika perubahan ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu. Padahal, pasar tenaga kerja bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan yang mampu menggabungkan dimensi waktu menjadi sangat penting dalam analisis pengangguran.

Pendekatan data panel menjadi salah satu metode yang relevan untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Data panel memungkinkan penggabungan antara data lintas wilayah dan data runtut waktu dalam satu model analisis. Dengan menggunakan data panel, peneliti dapat mengamati perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu sekaligus membandingkan antar wilayah. Hal ini

memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan fenomena pengangguran regional. Selain itu, data panel juga dapat meningkatkan jumlah observasi sehingga hasil estimasi menjadi lebih efisien (Amin et al., 2023).

Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaruh variabel pendidikan, upah minimum, dan partisipasi angkatan kerja terhadap pengangguran. Beberapa penelitian menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap pengangguran, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Demikian pula dengan variabel upah minimum yang memiliki dampak berbeda tergantung pada kondisi wilayah. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel tersebut sangat kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk memperoleh hasil yang lebih akurat (Ghinastri & Syafitri, 2024b).

Keterbatasan penelitian terdahulu dalam menangkap variasi antarwilayah menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Provinsi Jawa Barat memiliki karakteristik ekonomi yang sangat beragam antar kabupaten/kota sehingga tidak dapat dianalisis secara agregat. Perbedaan tersebut mencakup struktur industri, tingkat pendidikan, serta kebijakan pengupahan yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan dinamika pengangguran di setiap wilayah memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kabupaten/kota menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi pasar tenaga kerja (Batubara, 2021).

Selain itu, periode penelitian juga menjadi aspek penting dalam memahami dinamika pengangguran secara komprehensif. Periode 2016–2025 mencakup

berbagai fase ekonomi yang berbeda, mulai dari pertumbuhan ekonomi, krisis pandemi, hingga pemulihan ekonomi. Setiap fase tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap kondisi pasar tenaga kerja. Pandemi COVID-19, misalnya, memberikan tekanan besar terhadap sektor industri dan menyebabkan peningkatan pengangguran secara signifikan. Oleh karena itu, analisis dalam rentang waktu yang panjang menjadi penting untuk menangkap perubahan struktural yang terjadi (Rahmah et al., 2025).

Dalam konteks pasar tenaga kerja, hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak dapat dipisahkan satu sama lain. RLS mencerminkan kualitas tenaga kerja yang memengaruhi peluang kerja individu. UMK memengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja serta menentukan biaya produksi. Sementara itu, TPAK menunjukkan besarnya jumlah tenaga kerja yang masuk ke dalam pasar kerja. Ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dalam menentukan keseimbangan pasar tenaga kerja (Kurniawan, 2024).

Dalam praktiknya, pengaruh ketiga variabel tersebut tidak selalu bersifat linear dan seragam di setiap wilayah. Pada daerah dengan struktur industri maju, peningkatan pendidikan belum tentu menurunkan pengangguran karena adanya ketidaksesuaian keterampilan. Kenaikan upah minimum juga dapat memberikan dampak yang berbeda tergantung pada tingkat produktivitas dan struktur biaya perusahaan. Selain itu, peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat meningkatkan tekanan pengangguran apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan (Salsabila et al., 2025).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Keterbatasan penelitian terdahulu dalam menangkap dimensi spasial dan temporal menunjukkan adanya kebutuhan akan analisis yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode 2016–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data panel untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika pengangguran antar wilayah dan antar waktu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi serta perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, kebijakan upah, dan partisipasi angkatan kerja, serta menunjukkan perbedaan antar wilayah dan waktu. Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris untuk mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap TPT secara lebih komprehensif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat tahun 2016–2025?
2. Apakah variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat tahun 2016–2025?
3. Apakah variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat tahun 2016–2025?
4. Apakah variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat tahun 2016–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat tahun 2016–2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat tahun 2016–2025.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat tahun 2016–2025.

4. Untuk menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat tahun 2016–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis, maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memperkaya teori mengenai pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Jawa Barat.
- 2) Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi kajian dalam penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai referensi atau perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang makro ekonomi di Indonesia.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan saran terkait dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Bagi Fakultas, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan tambahan referensi, perbandingan, serta bahan bacaan untuk mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Bojonegoro.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2016–2025 untuk menggambarkan dinamika pasar tenaga kerja dalam jangka waktu yang relatif panjang. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Open Data Provinsi Jawa Barat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data panel yang menggabungkan dimensi waktu dan wilayah. Penelitian ini hanya memfokuskan pada tiga variabel independen, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sehingga faktor lain di luar variabel tersebut tidak dibahas dalam penelitian ini.